



Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Potensi Pertumbuhan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017- 2021

Azwar

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: azwar.iskandar@gmail.com

Keywords:

independence, regional finance, share, growth, South Sulawesi

ABSTRACT

This study aims to analyze the independence of regencies/cities in South Sulawesi Province and prospects for their economic development using a quantitative approach with share, growth, elasticity, quadrant, and Financial Capability Index (IKK) analysis methods. The results of the study show: (1) the average share value of districts/cities in South Sulawesi Province during the 2017-2021 period describes that they are not fully independent in terms of sources and allocation of regional budgets; (2) in general, the average growth rate for districts/cities in South Sulawesi Province during the 2017-2021 period show that they have good prospects and expectations for economic growth; (3) based on the quadrant mapping results, Makassar City and East Luwu Regency are in Quadrant I. In Quadrant II, there are Bantaeng, Soppeng, Gowa, Maros, Sidenreng Rappang, Enrekang, Luwu, Bulukumba, Pare-pare, Pinrang, Selayar Islands Regencies, North Toraja, Takalar, Barru, Jeneponto, and Sinjai, where almost all of them are natural resource producing areas. Furthermore, there are no districts/cities that are included in Quadrant III. In Quadrant IV, several regencies such as Bone, Palopo, Pangkajene Islands, Tana Toraja, Wajo, and North Luwu fall into this category; (4) the classification of the financial capability index resulting from the share, growth, and elasticity index values, which is equal to 0.48, is in the high category. In the pattern of regional financial capacity relations, most districts/cities in South Sulawesi Province have a consultative relationship pattern, thus the central government's interference has begun to decrease and the regions are considered capable of implementing regional autonomy.

Kata Kunci:

kemandirian, keuangan daerah, share, growth, Sulawesi Selatan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemandirian kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan prospek perkembangan ekonominya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis *share*, *growth*, *elasticity*, kuadran, dan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK). Hasil penelitian menunjukkan: (1) rata-rata nilai *share* yang menggambarkan tingkat kemandirian kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2017-2021 adalah sebesar 16,7%. Artinya, secara umum (*agregat*) kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan terbelang belum sepenuhnya mandiri dalam sumber dan pengalokasian anggaran daerah; (2) secara umum, rata-rata tingkat pertumbuhan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2017-2021 adalah sebesar 2,4%. Artinya, secara umum kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan terbelang memiliki prospek dan harapan yang baik dalam pertumbuhan ekonomi karena nilai indikator *growth* bernilai positif; (3) pada hasil pemetaan kuadran, Kota Makassar dan Kabupaten Luwu Timur berada pada Kuadran I. Pada Kuadran II, terdapat Kabupaten Bantaeng, Soppeng, Gowa, Maros, Sidenreng Rappang, Enrekang, Luwu, Bulukumba, Parepare, Pinrang, Kepulauan Selayar, Toraja Utara, Takalar, Barru, Jeneponto, dan Sinjai, dimana hampir semuanya adalah daerah penghasil SDA. Selanjutnya, tidak ada kabupaten/kota yang masuk dalam Kuadran III. Pada Kuadran IV, beberapa kabupaten seperti Bone, Palopo, Pangkajene Kepulauan, Tana Toraja, Wajo, dan Luwu Utara masuk dalam kategori ini; (4) klasifikasi dari indeks kemampuan keuangan yang dihasilkan dari nilai indeks *share*, *growth*, dan *elasticity*, yaitu sebesar 0,48, dengan kategori tinggi. Dalam pola hubungan kemampuan keuangan daerah, kebanyakan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki pola hubungan konsultatif, yang berarti bahwa campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan daerah dianggap sudah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah.

JEL CLASSIFICATION: R11;

How to cite: Azwar, Azwar. (2023). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Potensi Pertumbuhan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021, Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol 7 (1), p.1-25.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

PENDAHULUAN

Terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian direvisi oleh UU Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 33 tahun 2004, memulai proses desentralisasi fiskal di Indonesia. Proses desentralisasi fiskal yang menghasilkan otonomi daerah mengubah cara pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia dalam beroperasi. Pemerintah daerah memiliki banyak kekuasaan setelah otonomi daerah. Sebaliknya, sebelum otonomi daerah, mereka memiliki kekuasaan yang terbatas pada semua bidang, termasuk keuangan, moneter, pertahanan, peradilan, agama, dan politik luar negeri (Akhmad, Romadhoni, & Diana, 2020).

Menurut Khusaini (2006), desentralisasi adalah proses pemindahan tanggung jawab, wewenang, dan sumber daya, termasuk sumber daya personil, pendanaan, dan beberapa hal lainnya, dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Selain itu, desentralisasi dapat didefinisikan sebagai pelimpahan wewenang untuk menerima anggaran atau keuangan, baik untuk administrasi maupun pemanfaatan (Adi & Ekaristi, 2009). Oleh karena itu, desentralisasi fiskal merupakan salah satu cara untuk memberikan otonomi keuangan kepada daerah. Kebijakan ini adalah proses meningkatkan peran dan pemberdayaan daerah selama pembangunan (Oates, 2011). Pada dasarnya, penerapan kebijakan otonomi daerah adalah jawaban atas aspirasi daerah Indonesia yang telah lama menginginkan peran yang lebih besar dan otonomi dalam mengelola kewenangan dan tanggung jawabnya untuk pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah.

Tujuan desentralisasi fiskal adalah untuk mencapai kemandirian daerah, terutama dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan daerah serta pelayanan prima kepada masyarakat (Agustina, 2013; Azimi, 2020; Haryanto, 2019). Kemandirian keuangan daerah adalah kondisi ketika pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan secara mandiri dari pendapatan asli daerah (Suhadak, Nugroho, & Wahyudi, 2007). Kemandirian keuangan daerah, menurut Halim (2013), didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah yang diperlukan. Besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan dari sumber lain, seperti bantuan pemerintah pusat dan pinjaman, menunjukkan kemandirian keuangan daerah.

Dengan mencapai aspek kemandirian tersebut, daerah diharapkan dapat memaksimalkan potensinya (Litvack & Seddon, 1999). Kemandirian daerah, khususnya melalui komponen Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), diharapkan akan menurunkan beban ketergantungan terhadap APBN. Daerah diharapkan dapat mengalokasikan dana APBN ke sektor-sektor yang menghasilkan investasi yang lebih besar, serta sektor yang meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Urip & Indahyani, 2017).

Savitry et al. (2011) menganalisis pelaksanaan otonomi daerah dengan membandingkan kemampuan keuangan antardaerah. Dengan menggunakan analisis dan pemetaan ini,

kesiapan setiap daerah untuk melaksanakan wewenang yang diberikan dapat dinilai. Samora (2010) menyatakan bahwa metode ini secara tidak langsung juga bermanfaat untuk mengevaluasi seberapa kuat penciptaan elemen kemandirian daerah, yang merupakan dasar untuk menentukan strategi pengembangan sektor-sektor potensial.

Meskipun demikian, upaya untuk mewujudkan kemandirian wilayah masih menghadapi beberapa hambatan. Menurut penelitian Setiaji & Adi (2007), penerapan desentralisasi fiskal meningkatkan ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat karena PAD tidak dapat memenuhi kebutuhan belanja daerah. Studi tambahan oleh Herawati et al. (2008), Widodo (2011), dan Susanto (2014) rata-rata menemukan bahwa daerah memiliki kemandirian yang rendah dan sangat bergantung pada bantuan pusat. Kawasan Timur Indonesia (KTI) juga mengalami tingkat kemandirian yang rendah.

Misalnya, studi Pilat & Morasa (2017) menemukan pola hubungan yang sangat rendah antara tingkat kemandirian dan pelayanan sosial kemasyarakatan di Kota Manado. Pola hubungan dengan pemerintah pusat juga instruktif, seperti yang ditunjukkan oleh temuan penelitian Susanto (2014) dan Dethan (2015) dengan lokus penelitian yang sama, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Nurhayati & Ulumudin (2015) menilai evaluasi kinerja keuangan daerah se-Karesidenan Pekalongan tahun 2007-2011 dan menemukan hasil yang sedikit berbeda. Nurhayati & Ulumudin (2015) menyimpulkan bahwa Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Batang, dan Kota Pekalongan memiliki indeks kemampuan keuangan regional yang tinggi. Kondisi keuangan daerah hanya rendah di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pekalongan.

Beberapa penyebab utama rendahnya kemandirian daerah adalah sebagai berikut: 1) potensi PAD yang rendah di daerah tersebut; dan 2) beban belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang cukup besar selama periode desentralisasi fiskal (Hidayat, Hadi, & Widiarsih, 2016). Perlu diingat bahwa Indonesia menerapkan desentralisasi fiskal dari segi belanja, bukan penerimaan (Kis-Katos & Sjahrir, 2017). Oleh karena itu, dari perspektif ketatanegaraan, otonomi daerah di Indonesia memiliki otonomi belanja APBD sendiri dan diberi kewenangan oleh pemerintah pusat. Namun, daerah tetap subordinat kepada pemerintah pusat (Muin, 2014).

Oleh karena itu, komponen penting dalam meningkatkan kemandirian daerah adalah pengelolaan belanja APBD yang lebih logis dan menghasilkan investasi (Sudaryati, 2013). Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa anggaran operasional, terutama belanja pegawai, terus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja lembaga pemerintahan dan birokrasi (Magno, Hakim, & Domai, 2015). Dengan kata lain, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fatoni & Nurhayati (2013), efisiensi belanja daerah adalah faktor utama dalam mencapai aspek kemandirian daerah. Ini dicapai melalui pembuatan anggaran partisipatif yang mendukung kinerja aparatur. Anggaran partisipatif adalah anggaran yang memperhitungkan peran dan kinerja karyawan secara optimal ((Usman & Paranoan, 2014).

Isu kemandirian daerah juga dipengaruhi oleh keanekaragaman geografis di Indonesia. Beberapa wilayah dianggap sebagai daerah penghasil sumber daya alam (SDA), sedangkan

sebagian lainnya dianggap sebagai daerah non-SDA, tetapi tetap memiliki basis penerimaan pajak yang sangat besar. Ironisnya, sebagian besar daerah tidak memiliki kekayaan SDA atau basis pajak yang memadai (Feryawan, 2011). Oleh karena itu, pemerataan pemerintah seharusnya menjadi prioritas utama untuk daerah-daerah yang tidak memiliki keduanya, melalui alokasi transfer ke daerah (Haryanto, 2017).

Sangat jelas bahwa karakteristik daerah yang tidak menghasilkan SDA dan daerah yang menghasilkan SDA sangat berbeda. Dengan cara yang sama, perbandingan peta kemampuan keuangan daerah tersebut. Namun, belum banyak penelitian yang membandingkan peta kemampuan keuangan daerah penghasil SDA dan non-SDA, terutama di tingkat kabupaten atau kota pada satu propinsi di KTI. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan analisis perbandingan peta kemampuan keuangan antara daerah penghasil SDA dan daerah non-SDA pada tingkat kabupaten/kota di beberapa propinsi di KTI karena analisis ini sangat penting bagi pemerintah untuk menetapkan pola strategi pengembangan ekonomi yang akan datang.

Beberapa studi sebelumnya telah menyelidiki kemandirian keuangan dan prospek pertumbuhan ekonomi daerah. Haryanto (2017) menganalisis pemetaan kemandirian keuangan daerah dalam menjalankan kewenangannya dengan membandingkan daerah penghasil SDA dan non-SDA. Dia melakukan ini dengan menggunakan metode kuadran, analisis persentase, dan pertumbuhan. Menurut analisis metode kuadran, hanya Kabupaten Badung yang masuk ke dalam kuadran I. Seluruh daerah non-SDA masuk ke dalam kuadran II, sementara seluruh daerah penghasil SDA masuk ke dalam kuadran III, kecuali Kabupaten Indragiri Hilir. Di kuadran IV, hanya Kabupaten Indragiri Hilir dari seluruh lokus penelitian. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemerintah harus memprioritaskan kebijakan Transfer ke Daerah untuk daerah-daerah di kuadran IV sehingga mereka dapat memperbaiki kondisi mereka di masa depan. Daerah-daerah yang menghasilkan sumber daya alam (SDA) memiliki nilai saham rata-rata yang lebih tinggi daripada daerah-daerah yang tidak menghasilkan SDA dari tahun 2010 hingga 2014. Dengan demikian, kecuali Kabupaten Badung, yang memiliki nilai saham rata-rata 88,47, daerah-daerah yang tidak menghasilkan SDA memiliki nilai saham rata-rata yang lebih rendah.

Pilat & Morasa (2017) melakukan penelitian tentang kemampuan keuangan daerah Kota Manado dengan menggunakan teknik perhitungan persentase dan pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Kota Manado masih jauh dari ideal. Menurut hasil perhitungan bagian dan pertumbuhan dari tahun 2011 hingga 2015, Kota Manado berada pada kuadran II, yang berarti kondisinya belum ideal. Hasilnya menunjukkan nilai bagian rata-rata sebesar 18,792% dan pertumbuhan rata-rata sebesar 120,503%. Ini berarti bahwa Pemerintah Daerah Kota Manado harus terus mengeksplorasi potensinya untuk meningkatkan PAD, yang merupakan komponen penting dari APBD. Hasil perhitungan Indeks Kemampuan Keuangan Kota Manado selama 5 tahun menunjukkan skala indeks 0,577, yang menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Manado memiliki kemampuan keuangan yang tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh analisis rasio kemandirian. Ini bertentangan dengan prinsip otonomi daerah, yang mengatakan bahwa

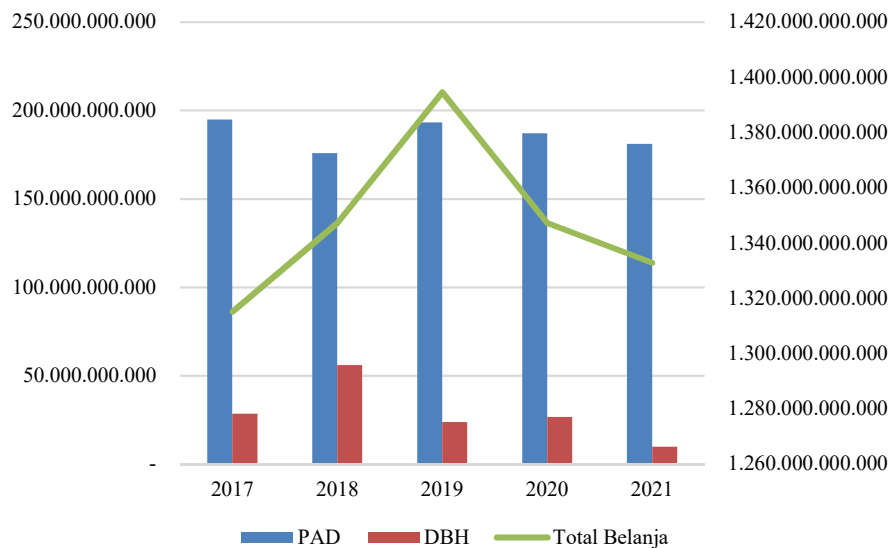
pemerintah daerah harus bebas dan memiliki kewenangan untuk mengelola urusannya sendiri.

Haryanto (2019) melakukan analisis kapasitas fiskal dan belanja fungsi lingkungan hidup dengan studi kasus pada provinsi di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2017. Menurut penelitian ini, provinsi Sulawesi Barat, NTT, Maluku, Papua, dan Gorontalo termasuk dalam kategori daerah dengan kemandirian keuangan rendah. Daerah otonom baru dibentuk selama periode desentralisasi fiskal, termasuk Gorontalo dan Sulawesi Barat. Sebenarnya, kedua wilayah tersebut menarik untuk dievaluasi lagi untuk menentukan apakah sisi pembentukan wilayah barunya sudah tepat. Dimasukkannya Provinsi Papua ke dalam kategori ini harus dipertimbangkan dengan cermat karena dana pusat yang dialokasikan oleh pemerintah selama ini sudah sangat besar secara finansial. Pada analisis *growth*, rata-rata pertumbuhan seluruh provinsi Indonesia justru menunjukkan angka yang buruk dari tahun 2010 hingga 2017. Artinya, prospek pertumbuhan ekonominya mengalami penurunan karena sejumlah masalah. Dari periode 2010–2017, hanya Provinsi Sulawesi Tengah yang mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata positif dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia sebesar 1,48%. Beberapa daerah lain di Indonesia mengalami penurunan ekonomi yang lebih kecil, seperti Gorontalo sebesar -0,27%, Sulawesi Selatan sebesar -0,38%, Kalimantan Selatan sebesar -0,44%, dan DIY sebesar -0,67.

Studi sebelumnya yang berfokus pada pelaksanaan desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan daerah seperti yang telah diuraikan di atas masih terbatas pada skala nasional yang relatif luas atau hanya pada tingkat provinsi. Studi yang berfokus pada pelaksanaan desentralisasi fiskal khususnya yang berkaitan dengan kemandirian keuangan daerah pada tingkat kabupaten atau kota dalam satu provinsi juga dianggap kurang, terutama di KTI. Karena setiap daerah (regional) memiliki karakteristik dan kondisi geografis yang berbeda-beda, ini seyogianya harus menjadi prioritas utama. Keberhasilan sangat bergantung pada elemen kemandirian daerah, terutama di tingkat lokal.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kemandirian dan prospek pertumbuhan ekonomi pada masing-masing kabupaten atau kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini akan mengevaluasi pelaksanaan desentralisasi fiskal pada tingkat regional—atau daerah—khususnya pada kabupaten atau kota di KTI. Penelitian ini menggunakan data dari masing-masing kabupaten atau kota di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai studi kasus. Untuk tujuan penelitian ini, provinsi Sulawesi Selatan dipilih sebagai subjek penelitian karena beberapa alasan. Yang pertama adalah bahwa provinsi ini memiliki capaian Indeks Gini yang relatif tinggi dan dinamis di KTI, di mana kualitas pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kesenjangan ekonomi. Kedua adalah bahwa data provinsi ini relatif lebih lengkap secara keseluruhan dibandingkan dengan provinsi lainnya, dan ini terkait dengan model dan analisis. Ketiga, provinsi ini merupakan salah satu representasi utama perekonomian Indonesia bagian timur dan menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif dinamis di Sulawesi, Maluku, dan Papua dibandingkan dengan provinsi lainnya di wilayah tersebut. Keempat, data perolehan PAD, Dana Bagi Hasil (DBH), dan Total Belanja Daerah di Kabupaten/Kota

Sulawesi Selatan selama periode penelitian bersifat fluktuatif, yang menarik untuk dianalisis lebih mendalam (lihat Grafik 1).



Grafik 1. Perbandingan Rerata Nilai PAD, DBH dan Total Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Dari Grafik 1, terlihat bahwa pada tahun 2017, nilai rerata masing-masing PAD, DBH, dan Total Belanja Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Selatan mencapai Rp 194,8 milyar, Rp 28,5 milyar, dan Rp 1,315 triliun. Nilai rerata PAD kemudian menurun pada tahun berikutnya, 2018, yakni mencapai Rp 175,8 milyar, sedangkan nilai rerata DBH dan Total Belanja justru meningkat, yakni mencapai Rp 55,9 milyar dan Rp 1,347 triliun. Memasuki tahun 2019, perolehan rerata PAD dan Total Belanja meningkat menjadi Rp 193,1 milyar dan Rp 1,394 triliun, sementara nilai rerata DBH justru menurun, yakni mencapai Rp 23,6 milyar. Di akhir periode penelitian, tahun 2021, rerata perolehan PAD dan DBH mencapai nilai yang paling rendah sejak 5 tahun terakhir, yakni mencapai sekitar Rp 180,9 milyar dan Rp 9,7 milyar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong penelitian eksploratif dengan tujuan untuk menemukan masalah baru untuk memperoleh pemahaman dan definisi yang lebih baik tentang hubungan antara perilaku variabel penyusun APBD dan kemandirian daerah (Hamdi & Ismaryati, 2019; John, 2013). Dari perspektif metodologis, penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif yang berbeda dari penelitian kualitatif. Studi kuantitatif ini menggunakan metode statistik untuk menganalisis angka numerik (Hamdi & Ismaryati, 2019; John, 2013). Pendekatan kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data dari PAD, DBH, dan total belanja APBD untuk setiap kabupaten atau kota.

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang berasal dari publikasi resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>). Data ini berasal dari realisasi belanja APBD dari tahun 2017 hingga 2021. Dianalisis 24 data

kabupaten dan kota untuk menjelaskan karakteristik dan indikator masing-masing, dan kemudian diplot dalam analisis kuadran. Untuk membedakan daerah-daerah yang menghasilkan SDA dan daerah-daerah yang tidak menghasilkan SDA, semua kabupaten dan kota yang ada dimasukkan ke dalam dua kelompok atau klaster. Klasifikasi yang dibuat berdasarkan data dari publikasi profil dan potensi daerah Sulawesi Selatan yang dirilis oleh lembaga *LOCALISE SDGs in Indonesia: Leadership, Ownership, and Capacities for Agenda 2030 Local Implementation and Stakeholders Empowerment* di website resminya (<https://localisesdgs-indonesia.org/>). Klasifikasi ini didasarkan pada potensi yang paling dominan untuk masing-masing kabupaten/kota, yaitu:

Tabel 1. Klasifikasi Kabupaten/Kota Penghasil SDA dan Non-SDA

Klasifikasi	Potensi Unggulan/Dominan	Kabupaten/Kota
SDA	Sektor Pertanian: komoditi padi, jagung	Sidenreng Rappang, Pinrang, Bone, Wajo, Soppeng, dan Luwu
	Sektor Perkebunan: komoditi kakao, kopi	Tana Toraja, Toraja Utara, Enrekang
	Sektor Pertambangan: komoditi emas, pasir besi, mangan, nikel, timah hitam, tembaga, marmer	Luwu, Enrekang, Tana Toraja, Bulukumba, Takalar, Kepulauan Selayar, Jeneponto, Bone, Barru, Luwu Timur, Tana Toraja, Luwu Utara
	Sektor Kehutanan: sutera alam	Wajo, Soppeng, Sidenreng Rappang
Non-SDA	Sektor Industri/Infrastruktur	Pare-pare, Gowa, Maros, Makassar, Takalar, Pangkajene Kepulauan

Untuk mendapatkan gambaran tentang kemandirian keuangan kabupaten atau kota dan prospek perkembangan ekonominya, metode analisis berikut digunakan: *share* (untuk menjelaskan kondisi kemandirian keuangan daerah), *growth* (untuk melihat aspek pertumbuhan yang mencerminkan prospek ekonomi ke depan), dan *elasticity* (untuk melihat elastisitas PAD dan DBH terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana peningkatan PAD dan DBH akan dilihat secara menyeluruh sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi), serta—dikombinasikan dengan—metode kuadran, yang sering digunakan pemerintah untuk melakukan analisis perbandingan kinerja publik, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal (Bappenas, 2003).

Metode kuadran ini, yang sering disebut sebagai salah satu upaya terbaik, menampilkan peta kemampuan keuangan daerah dengan mempertimbangkan nilai besaran *share* atau kontribusi pendapatan daerah terhadap total belanja APBD serta nilai *growth* untuk menunjukkan pertumbuhan komponen pendapatan daerah dalam APBD. Kemudian, ketiga indikator di atas (*share*, *growth*, dan *elasticity*) digabungkan ke dalam metode Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) daerah. Selanjutnya, nilai IKK diklasifikasikan atau dikelompokkan sesuai dengan tingkat kemampuan keuangan daerah, dan peta kemampuan keuangan daerah dibuat berdasarkan IKK yang diperoleh, seperti konsultatif, instruktif, partisipatif, dan delegatif.

Secara rinci, metode-metode analisis yang digunakan diuraikan sebagai berikut:

Pertama, perhitungan indikator *share* dilakukan dengan menggunakan formula berikut (Bappenas, 2003; Haryanto, 2019):

$$Share = \frac{(PAD + DBH)}{Total\ Belanja\ Daerah} \times 100\%$$

dimana:

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DBH : Dana Bagi Hasil

Total Belanja : Total Belanja Kabupaten/Kota dalam Laporan Realisasi APBD

Nilai *share* yang tinggi menunjukkan bahwa pendapatan daerah memberikan kontribusi yang tinggi terhadap total belanja daerah. Sebaliknya, nilai *share* yang rendah menunjukkan bahwa pendapatan daerah memberikan kontribusi yang rendah terhadap total belanja daerah.

Kedua, perhitungan metode indikator *growth* dihitung dengan menggunakan rumus (Bappenas, 2003; Haryanto, 2019):

$$Growth = \frac{(PAD + DBH)_t - (PAD + DBH)_{t-1}}{(PAD + DBH)_{t-1}} \times 100\%$$

dimana:

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DBH : Dana Bagi Hasil

t : Periode Saat Ini

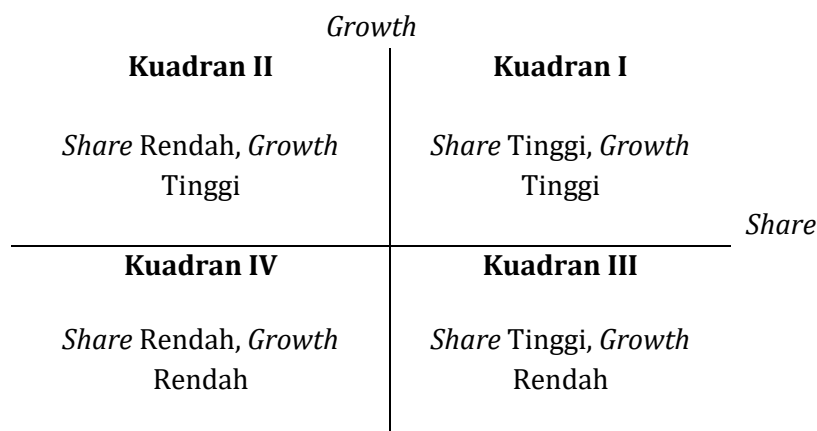
t-1 : Periode Sebelumnya

Ketiga, pendekatan kuadran akan membagi daerah menjadi empat kuadran yang masing-masing memiliki karakteristik tertentu. Ini adalah kuadran ideal (Bappenas, 2003; Haryanto, 2019):

- a. Kuadran I adalah kuadran yang paling ideal, dibentuk oleh kombinasi karakteristik *share* dan *growth* yang tinggi;
- b. Kuadran II adalah kuadran yang menggambarkan kondisi yang belum ideal. Namun, PAD pada daerah-daerah dalam kuadran ini mungkin dapat berperan besar dalam membiayai total belanjanya karena memiliki kemampuan untuk mengembangkan

potensi lokalnya. Daerah dengan rasio *share* rendah tetapi pertumbuhan tinggi berada di kuadran ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebut mungkin menjadi tidak mandiri tetapi masih memiliki potensi;

- c. Kuadran III adalah kuadran yang menggambarkan kondisi daerah dengan rasio *share* rendah tetapi pertumbuhan rendah berada di kuadran ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tersebut dapat mencapai status tidak mandiri tetapi dengan potensi yang rendah;
- d. Kuadran IV adalah kuadran yang paling tidak ideal karena menggambarkan ciri-ciri wilayah dengan *share* rendah dan pertumbuhan yang lemah. Ini menunjukkan bahwa PAD dan DBH belum memainkan peran yang signifikan dalam membiayai total belanja APBD. Kondisi ini juga menunjukkan kondisi yang tidak mandiri dan kurang berpotensi.



Gambar 1. Kuadran Gabungan *Share* dan *Growth*
Sumber: Bappenas (2003); Haryanto (2019)

Keempat, perhitungan *elasticity* menggunakan rumus berikut (Bappenas, 2003):

$$Elasticity = \frac{PAD + DBH \text{ Growth}}{PDRB \text{ Growth}}$$

dimana:

PAD+DBH Growth : Pertumbuhan PAD+DBH
PDRB Growth : Pertumbuhan PDRB

Kelima, analisis kemampuan atau kemandirian keuangan dilakukan dengan cara menghitung Indeks Kemampuan Keuangan (IKK). Metode IKK merupakan rata-rata hitung dari indeks *share*, pertumbuhan (*growth*), dan elastisitas. Untuk menyusun indeks ketiga komponen tersebut, ditetapkan nilai maksimum dan minimum dari masing-masing komponen. Dalam menyusun indeks untuk setiap komponen IKK, dilakukan dengan cara menggunakan persamaan umum sebagai berikut (Bappenas, 2003):

$$Nilai Indeks = \frac{Nilai Pengukuran - Nilai Minimum}{Nilai Maksimum - Nilai Minimum}$$

Keenam, berdasarkan nilai indeks yang diperoleh di atas, IKK dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$IKK = \frac{X_s + X_g + X_e}{3}$$

dimana:

X_s : Indeks *Share*
 X_g : Indeks *Growth* (Pertumbuhan)
 X_e : Indeks *Elasticity*

Ketujuh, nilai IKK yang sudah diperoleh kemudian dikelompokkan ke dalam kriteria tingkat kemampuan keuangan daerah sebagai berikut (Savitry et al., 2011):

Tabel 2. Kriteria Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah

Indeks Kemampuan Keuangan	Klasifikasi
0,00 - 0,33	Rendah
0,34 - 0,43	Sedang
0,44 - 1,00	Tinggi

Sumber: Savitry et al. (2011)

Kedelapan, analisis kemudian dilanjutkan dengan menyusun pola hubungan kemampuan keuangan daerah berdasarkan IKK yang diperoleh ke dalam beberapa kategori sebagai berikut (Haryanto, 2018):

Tabel 3. Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemampuan (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	26 – 50	Konsultatif
Sedang	51 – 75	Partisipatif
Tinggi	76 – 100	Delegatif

Sumber: Haryanto (2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis dan pembahasan kajian akan dibedakan ke dalam analisis *share*, analisis *growth*, analisis gabungan dalam metode kuadran, analisis *elasticity*, analisis indeks dan IIK, lalu tingkat kemampuan daerah dan pola hubungan. Penjelasan lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

Hasil Analisis *Share*

Dengan menggunakan analisis *share*, dapat dilihat bahwa rata-rata nilai *share* yang menggambarkan tingkat kemandirian kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama

periode 2017-2021 adalah sebesar 16,7%. Artinya, secara umum (*agregat*) berdasarkan indikator *share*, kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan terbelang belum sepenuhnya mandiri dalam sumber dan pengalokasian anggaran daerah (Tabel 4).

Tabel 4. Nilai *Share* Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota	Share (Tahun)					Rerata
	2017	2018	2019	2020	2021	
Kelompok SDA						
Bantaeng	9,31	14,43	11,65	13,36	13,09	12,37
Barru	14,48	14,19	11,88	12,56	11,27	12,88
Bone	13,92	12,79	10,47	12,13	8,42	11,55
Bulukumba	15,73	13,32	12,81	13,05	11,65	13,31
Enrekang	11,81	10,55	8,24	8,43	8,00	9,41
Jeneponto	10,25	11,20	8,59	10,07	8,61	9,74
Kepulauan Selayar	10,54	8,75	8,43	8,12	6,21	8,41
Luwu	9,85	11,22	8,81	9,81	9,81	9,90
Luwu Timur	23,19	24,37	28,77	30,23	21,88	25,69
Luwu Utara	10,42	12,08	10,36	9,27	9,98	10,42
Palopo	19,25	18,34	18,69	20,72	15,81	18,56
Pinrang	11,18	13,50	11,36	11,21	10,99	11,65
Sidenreng Rappang	12,67	14,07	11,52	12,58	11,76	12,52
Sinjai	11,69	11,56	10,36	9,59	8,26	10,29
Soppeng	12,91	14,97	13,11	13,68	15,66	14,06
Tana Toraja	13,71	9,45	11,39	11,39	9,18	11,02
Toraja Utara	5,76	9,45	7,05	6,46	4,98	6,74
Wajo	17,07	13,31	12,90	12,96	11,10	13,47
Rerata Kelompok SDA	12,99	13,20	12,02	12,53	10,93	12,33
Kelompok Non-SDA						
Gowa	16,85	16,03	13,61	13,97	14,68	15,03
Makassar	43,94	41,33	38,92	40,32	36,90	40,28
Maros	17,02	20,20	19,24	16,41	17,06	17,99
Pangkajene Kepulauan	14,48	15,54	15,13	16,31	12,72	14,84
Pare-pare	16,47	21,85	16,44	21,23	19,52	19,10
Takalar	12,11	14,84	10,48	14,88	11,54	12,77
Rerata Kelompok Non-SDA	20,15	21,63	18,97	20,52	18,74	20,00
Rerata Total	16,57	17,41	15,50	16,53	14,83	16,17

Sumber: Hasil Olah Data

Dari Tabel 4, diketahui bahwa di antara daerah penghasil SDA secara keseluruhan, Kabupaten Luwu Timur memiliki nilai *share* yang paling tinggi, dengan rata-rata 5 tahun mencapai 25,69, tetapi pada tahun 2020, nilai *share* Kabupaten Luwu Timur mencapai terendah. Fakta yang menarik, nilai *share* daerah penghasil SDA secara keseluruhan lebih rendah secara rata-rata dibandingkan dengan nilai *share* daerah non-SDA. Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Kepulauan Selayar masing-masing memiliki nilai persentase paling rendah dibandingkan daerah lainnya, masing-masing 6,74 dan 8,41. Kota Palopo adalah daerah berikutnya yang menunjukkan nilai persentase yang relatif besar, sebesar 18,56, dan disusul oleh Kabupaten Soppeng dengan rata-rata 14,06 dan Kabupaten Wajo dengan rata-rata 13,47.

Dengan mengacu pada perhitungan nilai *share* yang diperoleh dari total belanja daerah, hipotesis yang dapat disampaikan—di mana saham daerah penghasil SDA rata-rata lebih rendah—adalah bahwa kemampuan daerah penghasil SDA untuk mengelola belanja APBD berada di atas batas rasionalitas. Ini berarti bahwa secara rasional, daerah-daerah penghasil SDA seharusnya memiliki potensi dan kemampuan yang lebih baik untuk menghasilkan uang. Karenanya, untuk mewujudkan APBD yang handal, transparan, dan berdaya guna untuk meningkatkan pelayanan publik, pembangunan daerah, dan pertumbuhan ekonomi, manajemen pengelolaan belanja APBD yang efektif seyogianya menjadi prasyarat wajib. Semua kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan dianggap sudah mapan, meskipun bukan hasil pemekaran. Namun, mereka menghadapi masalah dalam mengelola APBD dari sisi belanja, yang ditunjukkan oleh nilai *share* yang rendah.

Daerah non-SDA menunjukkan pola yang hampir sama dan memiliki kemandirian yang relatif rendah. Kecuali Kota Makassar, yang merupakan ibu kota propinsi dan merupakan salah satu daerah yang potensial, memiliki rerata nilai *share* sebesar 40,28. Namun, selama lima tahun terakhir, nilai *share* kota tersebut tidak stabil. Tabel 4 menunjukkan hasil akhir analisis secara keseluruhan.

Sebagai sebuah kota, bukan kabupaten, Makassar memiliki nilai rerata *share* tertinggi dari seluruh wilayah. Mungkin benar dan tidak terbantahkan bahwa pembangunan kabupaten lebih sulit dibandingkan kota. Hal ini dapat disebabkan oleh luasnya wilayah kabupaten dibandingkan luas wilayah kota. Selain itu, dalam hal peraturan, kabupaten baru harus memiliki minimal lima kecamatan. Ini berbeda dengan kota baru yang hanya memiliki empat kecamatan. Selain itu, modernisasi sektor-sektor kota akan berdampak besar pada kinerja keuangan APBD masing-masing. Kota biasanya dikaitkan dengan sektor modern dan terbangun, sementara kabupaten lebih mirip dengan sektor tradisional dan tidak menghasilkan nilai tambah yang signifikan dari penerimaan PAD-nya. Meskipun demikian, sinyalemen dan fenomena yang terjadi di Kota Makassar ini tidak serta merta berlaku untuk semua wilayah. Kota Pare-pare memiliki nilai rerata *share* yang lebih rendah dari beberapa kabupaten lain, seperti Luwu Timur. Hal ini mungkin karena Kota Makassar berada di lokasi yang lebih strategis dibandingkan dengan Kota Pare-pare. Dibandingkan dengan Kota Pare-pare atau Palopo, modernisasi dan industrialisasi Kota Makassar sebagai ibu kota propinsi berkembang lebih cepat.

Selain itu, analisis yang ditunjukkan dalam Tabel 4 menunjukkan bahwa daerah-daerah yang menghasilkan SDA memiliki nilai *share* yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah-daerah yang tidak menghasilkan SDA. Padahal, di era desentralisasi fiskal, daerah-daerah yang menghasilkan SDA memiliki peluang besar untuk menjadi daerah yang sangat mandiri. Sangat penting untuk mengelola belanja APBD dengan baik. Dengan mempertimbangkan sifat kekayaan sumber daya alam (SDA) yang tidak dapat diperbaharui, daerah-daerah yang menghasilkan SDA seharusnya mulai mempertimbangkan untuk memulai transformasi sektoral dengan menggunakan kekayaan SDA yang saat ini masih melimpah. Proses peralihan sektoral ini harus dimulai segera setelah wilayah tersebut mengalami penurunan dalam produksi kekayaan SDA-nya.

Ke depan, daerah-daerah yang tidak termasuk dalam kategori SDA harus mempertimbangkan untuk mengkaji ulang besaran total belanja APBD yang lebih rasional. Hal ini perlu dilakukan mengingat bahwa selama periode 2017-2021, daerah-daerah non-SDA rata-rata berada dalam kategori *share* yang lebih rendah. Jika pola ini diteruskan, bukan tidak mungkin nilai saham daerah akan terus menurun seiring dengan peningkatan beban belanja APBD ke depannya. Nilai *share* Kabupaten Takalar, misalnya, tidak pernah lebih dari 15% setiap tahun. Meskipun demikian, karena posisinya sebagai daerah penyangga ibu kota propinsi bersama dengan Kabupaten Gowa dan Maros, Kabupaten Takalar seharusnya memiliki kemampuan untuk berkembang lebih cepat dan lebih besar dibandingkan dengan apa yang telah dicapai saat ini. Reformasi manajemen belanja adalah salah satu cara yang paling mungkin untuk dicapai jika peningkatan PAD tidak sesuai dengan harapan. Belanja administratif rutin harus secara bertahap dikurangi oleh daerah. Sebaliknya, belanja investasi, yang memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan sektor lain, harus terus ditingkatkan.

Mengubah penampilan kota menjadi lebih kontemporer dan sesuai dengan perubahan yang membawa nilai tambah besar adalah tantangan ke depan. Peningkatan kapasitas dan kualitas belanja APBD kabupaten/kota sangat penting untuk mendorong investasi swasta untuk modernisasi kabupaten sambil mempertahankan nilai-nilai keasliannya. Investasi swasta akan datang dengan sendirinya ketika belanja APBD kabupaten mampu memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar.

Hasil Analisis *Growth*

Dengan menggunakan analisis *growth*, dapat dilihat bahwa secara umum, rata-rata tingkat pertumbuhan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2017-2021 sebesar 2,4%. Artinya, secara umum (*agregat*) berdasarkan indikator *growth*, kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan terbilang masih memiliki prospek dan harapan yang baik dalam pertumbuhan ekonomi karena nilai indikator *growth* bernilai positif (Tabel 5).

Hasil yang sama diperoleh pada analisis *share*, yaitu bahwa daerah-daerah penghasil SDA memiliki nilai rerata *growth* yang lebih rendah dibandingkan daerah-daerah Non-SDA. Kabupaten Maros dan Gowa sebagai kelompok daerah Non-SDA memiliki nilai pertumbuhan tertinggi, masing-masing 5,45 dan 4,78, selama periode tahun 2017-2021.

Kota Makassar, yang berada di dekatnya, menyusul dengan skor 2,47. Hasil ini menarik karena dua dari tiga besar daerah non-SDA (Gowa dan Maros) dengan *growth* tinggi ini memiliki nilai *share* di bawah rata-rata, atau paling tidak lebih rendah dari kebanyakan daerah penghasil SDA.

Tabel 5. Nilai *Growth* Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota	Growth (Tahun)					
	2017	2018	2019	2020	2021	Rerata
Kelompok SDA						
Bantaeng	(8,22)	60,94	(10,60)	4,34	0,82	9,46
Barru	40,13	(3,35)	(16,30)	(1,59)	(13,58)	1,06
Bone	34,28	(8,19)	(13,52)	19,09	(35,20)	(0,71)
Bulukumba	51,48	(20,31)	(0,08)	(0,18)	(15,34)	3,11
Enrekang	43,64	(8,96)	(18,43)	7,20	(3,90)	3,91
Jeneponto	12,68	14,03	(12,77)	9,80	(17,95)	1,16
Kepulauan Selayar	40,72	(1,80)	(4,91)	(3,75)	(22,46)	1,56
Luwu	5,71	18,41	(14,75)	9,15	(1,08)	3,49
Luwu Timur	(0,92)	12,79	18,04	(0,68)	(24,29)	0,99
Luwu Utara	(24,01)	21,89	(8,30)	(11,46)	0,11	(4,35)
Palopo	17,80	(2,85)	(0,81)	9,40	(24,36)	(0,17)
Pinrang	0,10	33,22	(19,45)	1,08	(4,23)	2,15
Sidenreng Rappang	33,78	1,34	(15,54)	5,70	(5,30)	4,00
Sinjai	25,41	0,10	(10,95)	(1,40)	(13,11)	0,01
Soppeng	24,91	16,53	(9,58)	9,75	2,00	8,72
Tana Toraja	25,58	(32,54)	25,10	(4,58)	(23,92)	(2,07)
Toraja Utara	4,24	81,32	(20,70)	(9,53)	(27,30)	5,60
Wajo	24,78	(24,88)	5,36	(7,99)	(10,00)	(2,55)
Rerata Kelompok SDA	19,56	8,76	(7,12)	1,91	(13,28)	1,97
Kelompok Non-SDA						
Gowa	35,67	0,62	(13,34)	3,53	0,79	5,45
Makassar	33,69	0,10	(5,23)	(13,32)	(2,90)	2,47
Maros	12,41	28,51	(2,89)	(11,21)	(2,90)	4,78
Pangkajene Kepulauan	3,58	11,67	(3,60)	5,97	(22,93)	(1,06)
Pare-pare	(1,01)	8,08	(12,08)	17,93	(3,87)	1,81
Takalar	10,21	26,24	(27,21)	22,38	(11,49)	4,03
Rerata Kelompok Non-SDA	15,76	12,54	(10,73)	4,22	(7,22)	2,91
Rerata Total	17,66	10,65	(8,92)	3,06	(10,25)	2,44

Sumber: Hasil Olah Data

Namun demikian, hasil ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gowa dan Maros memiliki nilai *share* yang relatif kecil karena manajemen pengelolaan belanja APBD kurang *manageable*. Daerah-daerah tersebut masih memiliki kemampuan untuk terus berkembang dari sisi

pertumbuhan APBD-nya. Salah satu temuan yang menarik juga adalah bahwa Kabupaten Luwu Timur, Soppeng, dan Wajo masuk ke dalam kategori daerah dengan rerata pertumbuhan APBD rendah, atau minus. Kabupaten Luwu Timur, Soppeng, dan Wajo sebenarnya layak bersaing dengan daerah lain dari sisi nilai *share*. Tabel 5 menunjukkan hasil analisis perbandingan *growth* daerah penghasil SDA dan Non-SDA.

Meskipun ada sedikit perbedaan jika dibandingkan dengan analisis *share*, dapat disimpulkan bahwa daerah-daerah Non-SDA memiliki karakteristik yang lebih baik dibandingkan dengan daerah-daerah penghasil SDA berdasarkan nilai *growth*. Hipotesis yang dapat menjelaskan fenomena ini adalah hubungannya dengan dampak *multiplier* yang dihasilkan. Haryanto (2017) menyatakan bahwa berdasarkan analisis input-output, industri berbasis SDA diketahui menjadi salah satu sektor yang memiliki daya konsentrasi besar dan tidak berkelanjutan. Ini berbeda dengan wilayah non-SDA, yang biasanya berfokus pada industri dan infrastruktur, yang memiliki daya yang tumbuh lebih lama dan lebih mampu menggerakkan industri lain dari hulu ke hilir. Hal ini dapat dilihat di antaranya dengan keberadaan Kawasan Industri Maros-Makassar (KIMA). Luas area P.T. KIMA terbentang di area seluas 203 ha, yang terletak di poros Maros-Makassar, di sekitar 15 km dari Kota Makassar. Pengembangan kawasan baru di Kabupaten Maros (KIMA 2 Maros) seluas 650 ha, merupakan bagian dari konsep pembangunan Kawasan Strategis Propinsi Maminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, Gowa, Takalar). P.T. KIMA telah mengembangkan usaha industri terpadu (*Newcore Business*), antara lain *Central Business Cluster* (CBC) dengan konsep "One Stop", yang menjadi terbaik di kawasan timur Indonesia. Skema bisnis yang dijalankan adalah kerjasama Pemerintah-Swasta. Oleh karena itu, tampaknya menjadi kewajiban yang tidak dapat ditawar lagi untuk merekomendasikan pelaksanaan segera proses shifting industri di wilayah yang menghasilkan SDA.

Nilai pertumbuhan yang rendah di beberapa daerah menunjukkan bahwa ada masalah bersama yang perlu ditangani oleh pemerintah daerah di Sulawesi Selatan. Untuk mengatasi masalah rendahnya pertumbuhan, masing-masing kabupaten dan kota dan provinsi harus bekerja sama dengan baik dalam kondisi ini. Sangat penting bagi kabupaten untuk mengejar aspek pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan. Hal ini ditunjukkan oleh karakteristik beberapa kabupaten yang memiliki nilai pertumbuhan rata-rata yang rendah. Jika tidak, kabupaten akan dianggap tidak mandiri dan memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang buruk. Daerah-daerah yang memiliki angka pertumbuhan yang negatif harus segera mengubah pola pembangunan mereka menuju konvergensi seperti semula karena mereka mungkin telah berada pada periode senja dari pola pertumbuhan APBD.

Hasil Analisis Metode Kuadran

Setelah analisis *share* dan *growth* selesai, seluruh area lokus penelitian disandingkan dan dipetakan ke dalam analisis metode kuadran. Analisis ini akan membagi area menjadi empat kuadran.

Hasil pemetaan kuadran pada Gambar 2, diuraikan sebagai berikut:

Kuadran I: terdapat Makassar dan Kabupaten Luwu Timur. Ini berarti bahwa dari semua kabupaten dan kota di Propinsi Sulawesi Selatan, kedua kabupaten ini memiliki nilai *share* dan *growth* yang paling tinggi. Ini juga menunjukkan bahwa kedua kabupaten/kota ini memiliki kemandirian daerah yang relatif tinggi dan prospek pertumbuhan ekonomi yang masih bagus. Mengingat bahwa kedua kabupaten/kota ini termasuk dalam kategori relatif rendah menurut analisis parsial nilai *growth*, pemerintah harus mempertahankan pencapaian ini dan merancang strategi pengembangan untuk periode berikutnya. Sekiranya beberapa kebijakan dan pungutan bertentangan dengan tujuan untuk mengembangkan sektor-sektor pendukung, kebijakan-kebijakan tersebut harus segera diubah sebelum menjadi hambatan struktural. Selain itu, keberhasilan di kedua wilayah ini harus direplikasi ke wilayah lain, tentu dengan dengan mempertimbangkan aspek lokal dan karakteristik unik masing-masing wilayah.

Kuadran II: Bantaeng, Soppeng, Gowa, Maros, Sidenreng Rappang, Enrekang, Luwu, Bulukumba, Pare-pare, Pinrang, Kepulauan Selayar, Toraja Utara, Takalar, Barru, Jeneponto, dan Sinjai adalah semua daerah yang masuk ke dalam kategori kuadran II. Dengan demikian, daerah ini dianggap tidak memiliki kemandirian yang memadai tetapi memiliki potensi pertumbuhan yang besar. Beban pengelolaan belanja daerah yang berat lebih menyebabkan tingkat kemandirian yang rendah. Daerah-daerah yang termasuk dalam kuadran II ini harus mengambil kebijakan yang efektif dalam pengelolaan manajemen belanja APBD karena pertumbuhan ekonomi akan menghadapi banyak tantangan ke depannya, terutama dari faktor eksternal. Kebijakan ini dapat berupa penghematan belanja daerah atau reformasi penguatan belanja-belanja yang produktif dan berdampak pada sektor-sektor lainnya. Selain itu, dominasi kabupaten di kuadran II ini memberikan jawaban atas masalah lambatnya kemandirian kabupaten. Karena beban belanja APBD yang besar, banyak kabupaten berada di level kemandirian rendah. Beban belanja APBD yang berlebihan memang berdampak negatif ketika status perekonomian dan APBD tidak cukup baik;

Kuadran III: Tidak ada kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan yang termasuk dalam kategori ini. Ini berarti bahwa tidak ada kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan yang menghasilkan SDA dan non-SDA dengan *share* yang tinggi dibandingkan dengan daerah lain tetapi memiliki pertumbuhan yang rendah. Dengan kata lain, tidak ada daerah yang termasuk ke dalam kategori sebagai daerah yang cukup mandiri tetapi memiliki potensi yang kurang. Seperti yang disebutkan sebelumnya, industri berbasis SDA cenderung tidak berkelanjutan dan tidak memiliki daya ungkit yang signifikan di industri hulu dan hilirnya, yang mengakibatkan pertumbuhan yang rendah.

Kuadran IV: beberapa kabupaten termasuk dalam kategori ini, antara lain Bone, Palopo, Pangkajene Kepulauan, Tana Toraja, Wajo, dan Luwu Utara. Karena dianggap sebagai daerah dengan nilai *share* dan pertumbuhan yang rendah, kuadran IV ini dianggap sebagai kategori daerah yang paling tidak ideal. Sepertinya kebijakan transfer daerah harus difokuskan pada daerah-daerah ini yang termasuk dalam kuadran IV agar mereka dapat maju ke kuadran lain yang memiliki manfaat yang lebih besar. Pilihan kebijakannya dapat mencakup peningkatan manajemen pengelolaan belanja APBD atau transformasi sektoral

di daerah dimana paradigma kekayaan SDA telah berubah menjadi investasi pengembangan. Pemerintah pusat dapat menggunakan daerah-daerah di kuadran IV ini sebagai referensi utama untuk menetapkan dan menerapkan kebijakan yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan mereka.



Gambar 2. Kuadran Gabungan Analisis *Share* dan *Growth*

Sumber: Hasil Olah Data

Hasil Analisis *Elasticity*

Hasil analisis *elasticity* untuk melihat elastisitas PAD dan DBH terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Analisis *Elasticity*

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	Rerata
Kelompok SDA						
Bantaeng	1,27	1,78	1,08	25,70	1,48	6,26
Barru	2,23	2,00	1,60	14,43	2,36	4,53
Bone	1,66	1,43	1,49	-48,52	1,52	-8,48
Bulukumba	2,28	2,64	2,33	30,34	2,45	8,01
Enrekang	1,73	3,24	1,52	6,74	1,26	2,90
Jeneponto	1,24	1,78	1,57	62,92	1,59	13,82

Kabupaten/Kota	Tahun					Rerata
	2017	2018	2019	2020	2021	
Kepulauan Selayar	1,38	1,00	1,10	-4,56	1,54	0,09
Luwu	1,45	1,64	1,41	7,55	1,63	2,73
Luwu Timur	7,55	7,19	24,59	20,70	- 15,74	8,86
Luwu Utara	1,37	1,44	1,46	-15,71	2,56	-1,78
Palopo	2,68	2,44	2,77	46,05	2,92	11,37
Pinrang	1,43	1,95	1,74	25,47	2,18	6,55
Sidenreng Rappang	1,79	2,80	2,48	-21,32	2,12	-2,43
Sinjai	1,62	1,55	1,69	6,19	1,58	2,53
Soppeng	1,56	1,85	1,70	6,24	2,55	2,78
Tana Toraja	1,84	1,20	1,58	-40,67	1,77	-6,86
Toraja Utara	0,70	1,17	0,93	38,01	1,23	8,41
Wajo	3,28	12,32	3,18	-11,08	1,64	1,87
Rerata Kelompok SDA	2,06	2,75	3,01	8,25	0,92	3,40
Gowa	2,34	2,25	1,82	7,94	2,02	3,27
Makassar	5,36	4,91	4,43	-31,74	8,26	-1,76
Maros	2,50	3,26	15,52	-1,51	12,54	6,46
Pangkajene Kepulauan	2,19	3,26	2,36	-9,65	3,68	0,37
Pare-pare	2,36	3,92	2,47	- 265,42	4,43	-50,45
Takalar	1,64	2,23	1,52	-24,40	2,28	-3,34
Rerata Kelompok Non-SDA	2,73	3,30	4,69	-54,13	5,53	-7,57
Rerata Total	3,00	7,81	3,93	-32,60	3,59	-2,85

Sumber: Hasil Olah Data

Berdasarkan Tabel 6 di atas, terlihat bahwa rerata nilai elastisitas pertumbuhan PAD dan DBH terhadap pertumbuhan PDRB kabupaten/kota di Sulawesi Selatan selama periode penelitian adalah sebesar -2,85. Nilai rerata tertinggi diperoleh Kabupaten Jeneponto yaitu sebesar 13,82%. Sementara, nilai terendah diperoleh Kota Pare-pare, yaitu sebesar -50,45%.

Hasil Indeksasi Nilai *Share*, *Growth*, *Elasticity*, IKK, Peta Kemampuan, dan Pola Hubungan

Setelah memperoleh nilai atau hasil dari masing-masing nilai *share*, *growth*, dan *elasticity*, maka IKK, peta kemampuan dan pola hubungan dapat dihitung, yaitu sebagai berikut:

Tabel 7. Indeksasi Nilai *Share*, *Growth*, *Elasticity*, IKK, Peta Kemampuan, dan Pola Hubungan

Kabupaten/Kota	Indeks
----------------	--------

	<i>Share</i>	<i>Growth</i>	<i>Elasticity</i>	IKK	Klasifikasi	Pola Hubungan
Kelompok SDA						
Bantaeng	0,60	0,28	0,21	0,36	Sedang	Konsultatif
Barru	0,50	0,31	0,23	0,35	Sedang	Konsultatif
Bone	0,57	0,50	0,80	0,62	Tinggi	Parisipatif
Bulukumba	0,41	0,33	0,20	0,31	Rendah	Konsultatif
Enrekang	0,37	0,36	0,30	0,34	Sedang	Konsultatif
Jeneponto	0,44	0,60	0,20	0,41	Sedang	Konsultatif
Kepulauan Selayar	0,51	0,38	0,76	0,55	Tinggi	Parisipatif
Luwu	0,45	0,55	0,22	0,41	Sedang	Konsultatif
Luwu Timur	0,46	0,60	0,61	0,55	Tinggi	Parisipatif
Luwu Utara	0,41	0,43	0,76	0,53	Tinggi	Parisipatif
Palopo	0,56	0,57	0,20	0,45	Tinggi	Konsultatif
Pinrang	0,26	0,41	0,21	0,29	Rendah	Konsultatif
Sidenreng Rappang	0,39	0,40	0,78	0,52	Tinggi	Parisipatif
Sinjai	0,59	0,34	0,21	0,38	Sedang	Konsultatif
Soppeng	0,42	0,53	0,26	0,40	Sedang	Konsultatif
Tana Toraja	0,41	0,52	0,80	0,58	Tinggi	Parisipatif
Toraja Utara	0,39	0,30	0,21	0,30	Rendah	Konsultatif
Wajo	0,40	0,45	0,55	0,47	Tinggi	Konsultatif
<i>Rerata Kelompok SDA</i>	0,45	0,44	0,42	0,44	Tinggi	Konsultatif
Kelompok Non-SDA						
Gowa	0,44	0,38	0,24	0,35	Sedang	Konsultatif
Makassar	0,48	0,34	0,75	0,52	Tinggi	Parisipatif
Maros	0,42	0,40	0,47	0,43	Sedang	Konsultatif
Pangkajene Kepulauan	0,59	0,63	0,75	0,66	Tinggi	Parisipatif
Pare-pare	0,49	0,46	0,80	0,58	Tinggi	Parisipatif
Takalar	0,52	0,58	0,79	0,63	Tinggi	Parisipatif
<i>Rerata Kelompok Non-SDA</i>	0,49	0,47	0,63	0,53	Tinggi	Parisipatif
<i>Rerata Total</i>	0,47	0,45	0,52	0,48	Tinggi	Konsultatif

Sumber: Hasil Olah Data

Tabel 7 di atas menunjukkan klasifikasi indeks kemampuan keuangan (IKK) masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan nilai *share*, *growth*, dan *elasticity*. Secara keseluruhan, IKK setiap kabupaten/kota sebesar 0,48, termasuk dalam kategori tinggi; Kabupaten Pangkajene Kepulauan memiliki nilai IKK tertinggi sebesar 0,66, dan Kabupaten Takalar dan Bone memiliki nilai IKK sebesar 0,66. Kabupaten Toraja Utara memiliki nilai indeks terendah sebesar 0,30.

Data Tabel 7 menunjukkan bahwa Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Takalar, dan Bone, bersama dengan kabupaten yang berada dalam kategori indeks kemampuan keuangan daerah tinggi, memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah

mereka dan menggunakannya untuk kebutuhan pembangunan. Sementara itu, kabupaten-kabupaten dengan klasifikasi sedang, seperti Bantaeng, Barru, Enrekang, Jeneponto, Luwu, Sinjai, Soppeng, Gowa, dan Maros, telah mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki, namun belum dapat memanfaatkannya secara optimal. Kabupaten-kabupaten dengan klasifikasi rendah, seperti Bulukumba, Pinrang, dan Toraja Utara, dianggap belum dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki secara maksimal, sehingga perlu dilakukan peningkatan, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

Tabel 7 juga menunjukkan pola hubungan kemampuan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan; kebanyakan kabupaten/kota memiliki pola hubungan konsultatif. Artinya, daerah dianggap sudah siap untuk menerapkan otonomi mereka karena campur tangan pemerintah pusat sudah berkurang dan fungsinya hanya memberikan konsultasi atau pengarahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, hasil analisis *share* menunjukkan bahwa, secara rata-rata, nilai *share* menggambarkan tingkat kemandirian kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2017-2021 adalah sebesar 16,7%. Ini menunjukkan bahwa, secara keseluruhan (*agregat*), berdasarkan indikator *share*, kabupaten/kota belum sepenuhnya mandiri dalam pengalokasian dan sumber anggaran daerah mereka. Sebuah hal yang menarik adalah bahwa, secara rata-rata, nilai *share* daerah penghasil SDA lebih rendah dalam kurun waktu 2017-2021 dibandingkan dengan daerah non-SDA. Ini karena nilai *share* dihitung dengan mengambil pembilang dari total belanja daerah, sehingga hipotesis yang dapat disampaikan adalah bahwa kemampuan daerah penghasil SDA untuk mengelola belanja APBD berada di atas batas rasionalitas. Akibatnya, untuk mewujudkan APBD yang handal, transparan, dan berdaya guna untuk meningkatkan pelayanan publik, pembangunan daerah, dan pertumbuhan ekonomi, manajemen pengelolaan belanja APBD yang efektif seyogianya menjadi prasyarat wajib.

Kedua, hasil analisis *growth* menunjukkan bahwa, secara keseluruhan, setiap kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tingkat *growth* rata-rata sebesar 2,4% selama periode 2017-2021. Ini menunjukkan bahwa, secara keseluruhan (*agregat*), berdasarkan indikator *growth*, masih ada prospek dan harapan yang positif untuk pertumbuhan ekonomi. Dalam analisis saham, hasil yang sama ditemukan: daerah yang menghasilkan SDA memiliki nilai rerata *growth* yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang tidak menghasilkan SDA. Cukup menarik jika melihat komposisi ini mengingat dari sisi *share*, dua dari tiga besar daerah Non-SDA (Gowa dan Maros) ini masuk dalam kategori yang tidak tinggi, paling tidak lebih rendah dari kebanyakan daerah penghasil SDA. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gowa dan Maros memiliki porsi yang relatif kecil karena manajemen pengelolaan belanja APBD yang kurang *manageable*. Daerah-daerah tersebut masih memiliki kemampuan untuk terus berkembang dari sisi pertumbuhan APBD-nya. Salah satu temuan yang menarik lainnya adalah bahwa Kabupaten Luwu Timur, Soppeng, dan Wajo telah dimasukkan ke dalam kategori daerah dengan rerata *growth* APBD rendah, atau minus. Kabupaten Luwu Timur, Soppeng, dan Wajo sebenarnya layak bersaing

dengan daerah lain dari segi nilai *share*. Fenomena ini mungkin dikaitkan dengan dampak multiplier yang dihasilkan. Berdasarkan metode input-output, industri berbasis SDA diketahui merupakan salah satu industri yang memiliki daya konsentrasi besar dan tidak berkelanjutan. Ini berbeda dengan wilayah non-SDA, yang biasanya berpusat pada industri dan infrastruktur, yang memiliki daya tumbuh lebih lama dan lebih mampu mendorong industri lain dari sisi hulu maupun hilir. Rerata nilai *growth* yang rendah menunjukkan bahwa ada masalah bersama yang harus ditangani oleh pemerintah daerah di Sulawesi Selatan. Untuk mengatasi masalah rendahnya pertumbuhan, masing-masing kabupaten dan kota dan provinsi harus bekerja sama dengan baik dalam kondisi ini.

Ketiga, di antara semua kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar dan Kabupaten Luwu Timur berada di Kuadran I, yang menunjukkan bahwa mereka masuk ke dalam kategori ideal dengan nilai *share* dan *growth* tertinggi. Selain itu, ini menunjukkan bahwa kedua kabupaten/kota ini memiliki kemandirian daerah yang relatif tinggi dan prospek pertumbuhan ekonomi yang masih bagus. Menurut analisis parsial nilai *growth*, kedua kabupaten/kota ini termasuk dalam kategori relatif rendah. Oleh karena itu, pemerintah harus mempertahankan pencapaian ini dan mengembangkan strategi pengembangan untuk periode berikutnya. Pada Kuadran II terdapat banyak kabupaten yang merupakan daerah penghasil SDA, seperti Bantaeng, Soppeng, Gowa, Maros, Sidenreng Rappang, Enrekang, Luwu, Bulukumba, Pare-pare, Pinrang, Kepulauan Selayar, Toraja Utara, Takalar, Barru, Jeneponto, dan Sinjai. Akibatnya, aspek kemandirian daerah SDA dianggap rendah, meskipun potensi pertumbuhannya sangat besar. Daerah-daerah yang termasuk dalam kategori kuadran II ini harus menerapkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan manajemen belanja APBD karena pertumbuhan ekonomi akan menghadapi banyak tantangan ke depannya, terutama dari sumber eksternal. Selain itu, tidak ada kabupaten atau kota yang termasuk dalam Kuadran III. Ini berarti bahwa tidak ada kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan, baik yang menghasilkan SDA maupun non-SDA, yang memiliki porsi yang tinggi dibandingkan dengan daerah lain tetapi memiliki pertumbuhan yang rendah. Beberapa kabupaten seperti Bone, Palopo, Pangkajene Kepulauan, Tana Toraja, Wajo, dan Luwu Utara termasuk dalam kategori di Kuadran IV. Karena dianggap sebagai daerah dengan nilai *share* dan pertumbuhan yang rendah, kuadran ini termasuk dalam kategori daerah yang paling tidak ideal. Sepertinya kebijakan transfer daerah harus difokuskan pada daerah-daerah yang termasuk dalam Kuadran IV untuk memungkinkan kemajuan ke kuadran lain yang memiliki manfaat yang lebih besar. Pilihan kebijakannya dapat mencakup peningkatan manajemen pengelolaan belanja APBD atau transformasi sektoral di daerah dimana paradigma kekayaan SDA telah berubah menjadi investasi pengembangan.

Keempat, klasifikasi dari indeks kemampuan keuangan pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang dihasilkan dari nilai indeks *share*, *growth*, dan *elasticity*, yaitu sebesar 0,48, dengan kategori tinggi. Nilai IKK tertinggi dicapai oleh Kabupaten Pangkajene Kepulauan yaitu sebesar 0,66. Kemudian disusul oleh Kabupaten Takalar dan Bone, dengan nilai IKK sebesar 0,63 dan 0,62. Sementara nilai indeks terendah dicapai oleh Kabupaten Toraja Utara, yaitu sebesar 0,30. Data menunjukkan bahwa Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Takalar, dan Bone, yang masing-masing termasuk dalam kategori indeks

kemampuan keuangan daerah yang tinggi, memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah mereka untuk digunakan untuk kebutuhan pembangunan. Sementara itu, kabupaten-kabupaten dengan klasifikasi sedang, seperti Bantaeng, Barru, Enrekang, Jeneponto, Luwu, Sinjai, Soppeng, Gowa, dan Maros, hanya mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki, namun belum dapat memanfaatkannya secara optimal. Kabupaten-kabupaten dengan klasifikasi rendah, seperti Bulukumba, Pinrang, dan Toraja Utara, dianggap belum dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki secara maksimal, sehingga perlu dilakukan peningkatan. Selain itu, mayoritas kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan pola konsultatif. Artinya, daerah dianggap sudah siap untuk menerapkan otonomi mereka karena campur tangan pemerintah pusat sudah berkurang dan fungsinya hanya memberikan konsultasi atau pengarahan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu hanya menganalisis kemandirian dan pembangunan daerah berdasarkan beberapa indikator, seperti *share*, *growth*, dan analisis kuadran. Padahal masih terdapat beberapa metode analisis lain yang dapat digunakan untuk memperkaya analisis dan pembahasan, di antaranya metode *shift*, rasio derajat desentralisasi fiskal, analisis input-output, rasio kemandirian, dan lainnya. Periode analisis yang digunakan juga masih tergolong singkat, yaitu hanya lima tahun, sehingga masih sulit untuk menjadikan hasil analisis sebagai kesimpulan untuk jangka panjang. Selain itu, terkait dengan substansi yang dianalisis, penelitian ini hanya mendasarkan kepada kinerja keuangan APBD semata, tidak mendiskusikan isu lainnya seperti kualitas belanja APBD atau kelemahan regulasi. Oleh karena itu, agenda penelitian selanjutnya adalah penggunaan beberapa metode analisis lain yang mungkin lebih kuat dan dalam, misalnya dengan teknik analisis statistika inferensial, dengan periode penelitian yang lebih panjang. Begitu juga, penelitian mendatang perlu memperluas kajian kemandirian keuangan daerah tidak hanya pada aspek nilai/besaran belanja daerah, tetapi juga pada aspek non-APBD, seperti kualitas belanja daerah, regulasi keuangan daerah, kepemimpinan daerah, dan lainnya, atau beberapa isu tematik dalam pembangunan lainnya, seperti dampak terhadap pengentasan kemiskinan, gender dan inklusivitas, dalam rangka memperluas cakrawala pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P. H., & Ekaristi, P. D. (2009). Fenomena Ilusi Fiskal Dalam Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(1), 1–19. doi: <https://doi.org/10.21002/jaki.2009.01>
- Agustina, O. A. (2013). *Analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah di era otonomi daerah: studi kasus Kota Malang (tahun anggaran 2007–2011)*. Skripsi: Malang: Universitas Brawijaya.
- Akhmad, A., Romadhoni, B., & Diana, F. (2020). Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan. *Patria Artha Journal Of Accounting & Financial Reporting*, 4(1), 1–12.
- Azimi, A. (2020). Analisis Perbandingan Efisiensi, Efektivitas dan Kemampuan Fiskal pada Era Otonomi Daerah di Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Barat. *JKUBS*, 1(1), 92–109. Retrieved from <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jkubs/article/view/116>
- Bappenas, (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). (2003). Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah. In *Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
- Dethan, S. H. (2015). Analisis kemampuan keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi NTB tahun anggaran 2009-2013. *Jurnal Ganesha Swara*, 9(2), 145–151.

- Retrieved from <http://unmasmataram.ac.id/wp/wp-content/uploads/25.-Stevany-2.pdf>.
- Fatoni, I., & Nurhayati, I. D. (2013). Pengaruh Anggaran dan Pengendalian Terhadap Efektivitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Malang. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 2(3), 17–30. Retrieved from <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jma/article/view/247/242>.
- Feryawan, D. Y. (2011). *Assessing natural resources curse hypothesis at the local level in Indonesia: the evidence of the missing money*. Erasmus University.
- Halim, A. (2013). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP-AMP.
- Hamdi, M., & Ismaryati, S. (2019). *Materi Pokok Metodologi Penelitian Administrasi; 1-12; MAPU5103/4 SKS*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Haryanto, J. T. (2017). Analisis Perbandingan Peta Kemampuan Keuangan Daerah Penghasil SDA dan Non-SDA di Era Desentralisasi Fiskal Studi Kasus: Penggunaan Metode Kuadran. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 8(2), 103–116. doi: <http://dx.doi.org/10.22212/jekp.v8i2.821>.
- Haryanto, J. T. (2018). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus: Provinsi Banten Tahu 2011-2015). *Inovasi*, 15(1), 1–10. doi: <https://doi.org/10.33626/inovasi.v15i1.22>.
- Haryanto, J. T. (2019). *Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim: Suatu Pengantar: Analisis Kapasitas Fiskal dan Belanja Fungsi Lingkungan Hidup Studi Kasus: Provinsi di Indonesia*. Bogor: Penerbit IPB Press.
- Herawati, N. R., Supratiwi, & Widayati, W. (2008). Optimalisasi Pajak Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah (Studi Penelitian Di Pemerintah Kota Semarang). *Jurnal Ilmu Sosial*, 12(1), 41–67. doi: <https://doi.org/10.14710/jis.12.1.2013.41-67>.
- Hidayat, M., Hadi, M. F., & Widiarsih, D. (2016). Analisis Kemampuan Keuangan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dalam Era Otonomi Daerah. *Jurnal Sungkai*, 4(2), 36–55. doi: <https://doi.org/10.30606/js.v4i2.1035>.
- John, W. C. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khusaini, M. (2006). *Ekonomi publik: Desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Kis-Katos, K., & Sjahrir, B. S. (2017). The impact of fiscal and political decentralization on local public investment in Indonesia. *Journal of Comparative Economics*, 45(2), 344–365. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jce.2017.03.003>.
- Litvack, J. I., & Seddon, J. (1999). *Decentralization briefing notes*. World Bank Institute Washington, DC.
- Magno, R. B., Hakim, A., & Domai, T. (2015). Pengaruh Pengelolaan Anggaran Terhadap Kinerja Organisasi Pemerintahan. *Reformasi*, 5(2), 321–330. doi: <https://doi.org/10.33366/rfr.v5i2.315>.
- Muin, F. (2014). Otonomi daerah dalam perspektif pembagian urusan pemerintah-pemerintah daerah dan keuangan daerah. *Fiat Justisia*, 8(1), 69–79. doi: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.288>.
- Nurhayati, S. F., & Ulumudin, I. (2015). *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Se Karesidenan Pekalongan Tahun 2007-2011*.
- Oates, W. E. (2011). *Fiscal Federalism: Paperback Edition*. United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited.
- Pilat, J. J., & Morasa, J. (2017). Analisis rasio keuangan anggaran APBD Kota Manado untuk menilai kinerja keuangan pemerintah Kota Manado tahun anggaran 2011-2015. *Jurnal Accountability*, 6(01).
- Samora, R. (2010). Peta kemampuan keuangan daerah pada pemerintahan kota dan kabupaten se-Jawa dan Bali tahun 2004-2008: Metode kuadran. *Jurnal Akuntansi*

- Kontemporer*, 2(1).
- Savitry, E., Saleh, H. A., & Arifin, I. (2011). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2007-2011 di Kota Makassar. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 23-34. Retrieved from <https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/1570>.
- Setiaji, W., & Adi, P. H. (2007). Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran. *Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar*.
- Sudaryati, D. (2013). Pengaruh penganggaran terhadap kinerja aparat pemda melalui sistem informasi keuangan daerah (Studi Kasus: Pemda Kab Kudus). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pekalongan*, 12(1), 5135. doi: <http://dx.doi.org/10.31941/jebi.v12i2.181>.
- Suhadak, Nugroho, T., & Wahyudi, S. (2007). *Paradigma baru pengelolaan keuangan daerah dalam penyusunan APBD di era otonomi*. Malang: Bayumedia: Lembaga Penerbitan & Dokumentasi, Universitas Brawijaya.
- Susanto, H. (2014). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 10(1), 15-26. doi: <https://doi.org/10.33830/jom.v10i1.108.2014>.
- Urip, T. P., & Indahyani, R. (2017). Analisis Flypaper Effect Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Jayapura. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 1(2). doi: <https://doi.org/10.55264/jumabis.v1i2.7>.
- Usman, E., & Paranoan, S. (2014). Anggaran partisipatif dalam menunjang kinerja aparatur pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(1), 127-135. doi: <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2013.04.7187>.
- Widodo, P. (2011). *Analisis kemampuan dan efektifitas keuangan daerah empat kabupaten di Pulau Madura dalam era otonomi daerah*.